

Strategi Peningkatan Kapabilitas Satgas Pamtas TNI AD Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan RI – RDTL Periode 2024-2025

Rudi Churniawan¹ Lukman Yudho Prakoso² Aom Dikdik Kustiwa³ Sigit Purwanto⁴
Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}
Email: rudivivi024@gmail.com¹

Abstract

Wilayah perbatasan darat Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL), khususnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, menghadapi ancaman serius berupa penyelundupan narkoba melalui jalur tidak resmi yang memanfaatkan kondisi geografis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan kapabilitas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI AD dalam mencegah penyelundupan narkoba pada periode 2024–2025. Penelitian dilakukan di kawasan PLBN Wini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan DOTMLPFI untuk mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas dan peluang penguatan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengamanan perbatasan memerlukan integrasi teknologi surveilans modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antar-instansi dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan teritorial. Strategi tersebut terbukti mampu memperkuat sistem deteksi dini dan mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan.

Keywords: Strategi, Kapabilitas, Satgas Pamtas, PLBN Wini, Narkoba, DOTMLPFI



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Peredaran gelap narkotika telah berkembang menjadi ancaman keamanan yang bersifat transnasional dan kompleks. Jaringan kejahatan internasional memanfaatkan berbagai celah geografis, sosial, dan kelembagaan untuk memperluas jalur distribusi narkoba lintas negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perbatasan yang luas menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan arus penyelundupan narkotika. Salah satu wilayah yang memiliki kerentanan cukup tinggi adalah kawasan perbatasan darat antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL), khususnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karakteristik geografis wilayah tersebut yang terdiri dari pegunungan, hutan, serta jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai “jalur tikus” sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara untuk melakukan aktivitas penyelundupan narkoba. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengamanan yang lebih adaptif dan komprehensif agar potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional dapat diminimalkan secara efektif.

Dalam konteks pengamanan wilayah perbatasan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah terdepan negara. Tugas tersebut dilaksanakan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Satgas Pamtas tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga integritas wilayah, tetapi juga berperan dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk

penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta aktivitas ilegal lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Namun demikian, dinamika perkembangan modus operandi jaringan narkoba internasional yang semakin kompleks menuntut peningkatan kapabilitas Satgas Pamantas agar mampu merespons berbagai ancaman secara lebih efektif dan terintegrasi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengamanan wilayah perbatasan dan peran aparat keamanan dalam mencegah kejahatan transnasional. Beberapa studi menunjukkan bahwa wilayah perbatasan memiliki kerentanan tinggi terhadap aktivitas ilegal akibat keterbatasan pengawasan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan. Penelitian mengenai manajemen keamanan perbatasan juga menekankan pentingnya pendekatan terpadu melalui koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi modern, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas pengawasan wilayah perbatasan. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat lokal serta sinergi antara berbagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan di kawasan perbatasan. Sejumlah studi dalam beberapa tahun terakhir juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pengamanan perbatasan. Penggunaan teknologi seperti sistem pengawasan berbasis sensor, kamera pemantau, serta kendaraan udara tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dinilai mampu meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap aktivitas ilegal di wilayah yang sulit dijangkau oleh patroli konvensional. Selain itu, pendekatan manajemen perbatasan terpadu atau Integrated Border Management juga banyak dikaji sebagai strategi untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam pengawasan perbatasan, seperti TNI, Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Pendekatan ini menekankan pentingnya pertukaran informasi, koordinasi operasional, serta penyelarasan kebijakan guna menciptakan sistem pengamanan perbatasan yang lebih efektif dan efisien.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika keamanan perbatasan, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kebijakan umum atau pendekatan keamanan secara makro. Penelitian yang secara khusus menganalisis strategi peningkatan kapabilitas Satgas Pamantas TNI AD dalam konteks pencegahan penyelundupan narkoba di kawasan PLBN Wini masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis kapabilitas militer dengan pendekatan kerangka DOTMLPFI (Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities, and Interoperability) dalam konteks pengamanan perbatasan juga belum banyak dilakukan. Padahal, kerangka DOTMLPFI dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas organisasi militer dalam menjalankan tugas operasionalnya. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif menganalisis peningkatan kapabilitas Satgas Pamantas dalam menghadapi ancaman penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan RI-RDTL. Kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji integrasi antara pemanfaatan teknologi modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga dalam kerangka pengamanan perbatasan secara terpadu. Ketiga, masih diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai peran pembinaan teritorial dalam melibatkan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari sistem deteksi dini terhadap aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan kapabilitas Satgas Pamantas dalam menghadapi ancaman penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena mengintegrasikan analisis strategi peningkatan kapabilitas Satgas Pamtas TNI AD dengan pendekatan kerangka DOTMLPFI dalam konteks pengamanan wilayah perbatasan RI–RDTL. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pemanfaatan teknologi pengawasan modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga dapat mendukung efektivitas pencegahan penyelundupan narkoba di kawasan PLBN Wini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian strategi pertahanan dan keamanan perbatasan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengamanan wilayah perbatasan yang lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi peningkatan kapabilitas Satgas Pengamanan Perbatasan TNI AD di PLBN Wini dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan RI–RDTL pada periode 2024–2025. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengamanan wilayah perbatasan, termasuk pemanfaatan teknologi pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta peran pembinaan teritorial dalam mendukung sistem deteksi dini terhadap aktivitas penyelundupan narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan kapabilitas Satgas Pamtas dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah perbatasan serta memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengamanan perbatasan nasional.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi peningkatan kapabilitas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI AD dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan RI–RDTL. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan melalui analisis terhadap pengalaman, persepsi, serta interaksi antar aktor yang terlibat dalam pengamanan wilayah perbatasan. Penelitian kualitatif juga memberikan fleksibilitas dalam menggali data empiris yang berkaitan dengan dinamika operasional Satgas Pamtas dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional di wilayah perbatasan.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi lapangan, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas pengamanan perbatasan. Temuan penelitian menunjukkan beberapa aspek utama yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas Satgas Pamtas TNI AD dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan RI–RDTL.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengamanan di kawasan PLBN Wini didukung oleh berbagai fasilitas pengawasan, antara lain kamera pengawas (CCTV), alat pemindai barang, serta sistem pemeriksaan kendaraan yang melintas di kawasan perbatasan. Selain itu, terdapat penggunaan teknologi pengawasan tambahan seperti perangkat sensor serta sistem pemantauan yang terhubung dengan pusat komando pengamanan perbatasan. Berdasarkan data dokumentasi, fasilitas pengamanan tersebut digunakan untuk mendukung proses pemeriksaan barang dan orang yang melintas di wilayah perbatasan. Personel yang bertugas

di PLBN Wini melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, barang bawaan, serta dokumen perjalanan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Selain fasilitas pemeriksaan di gerbang utama PLBN, kegiatan patroli juga dilakukan di sejumlah titik yang berada di sekitar wilayah perbatasan untuk memantau jalur tidak resmi yang sering digunakan oleh pelintas batas.

Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa personel Satgas Pamtas mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan fisik, pelatihan taktis patroli perbatasan, serta pelatihan pengoperasian peralatan pengawasan. Selain pelatihan internal, terdapat pula kegiatan pelatihan bersama dengan instansi lain yang tergabung dalam sistem pengawasan perbatasan, seperti Kepolisian, Bea Cukai, dan Imigrasi. Kegiatan pelatihan bersama tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi serta kesamaan prosedur dalam pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan. Personel Satgas Pamtas juga melakukan kegiatan patroli rutin di jalur-jalur yang berada di sekitar wilayah perbatasan untuk memantau aktivitas masyarakat dan pergerakan yang terjadi di wilayah tersebut.

Koordinasi Antar Instansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan di PLBN Wini melibatkan beberapa instansi yang tergabung dalam sistem Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS). Instansi yang terlibat dalam pengawasan perbatasan meliputi TNI, Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, koordinasi antar instansi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi rutin serta pelaksanaan operasi gabungan di kawasan perbatasan. Selain itu, pertukaran informasi juga dilakukan melalui komunikasi langsung antar petugas yang bertugas di PLBN Wini. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, masing-masing instansi menjalankan peran sesuai dengan kewenangannya, seperti pemeriksaan dokumen perjalanan oleh petugas imigrasi, pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai, serta pengamanan wilayah oleh aparat TNI dan kepolisian.

Implementasi Standar Operasional Prosedur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan di PLBN Wini dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP tersebut mengatur tahapan pemeriksaan terhadap orang, barang, serta kendaraan yang melintas di wilayah perbatasan. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, pemeriksaan barang bawaan, serta verifikasi identitas pelintas batas. Proses pemeriksaan dilakukan di area pemeriksaan yang telah disediakan di kawasan PLBN Wini. Selain pemeriksaan di gerbang utama, petugas juga melakukan kegiatan patroli di wilayah sekitar perbatasan untuk memantau aktivitas yang terjadi di jalur tidak resmi.

Dukungan Logistik dan Peralatan Operasional

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan perbatasan didukung oleh berbagai peralatan operasional, seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, serta perlengkapan pengawasan wilayah. Kendaraan patroli digunakan oleh personel untuk melakukan pemantauan di wilayah sekitar perbatasan. Peralatan komunikasi digunakan untuk mendukung koordinasi antara personel yang bertugas di lapangan dengan pos komando pengamanan. Selain itu, perlengkapan pengawasan digunakan untuk mendukung kegiatan pemantauan di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah sekitar PLBN Wini memiliki kondisi geografis yang terdiri dari perbukitan dan jalur yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kendaraan. Di beberapa lokasi terdapat jalur kecil yang digunakan oleh masyarakat untuk melintas di wilayah perbatasan. Jalur-jalur tersebut berada di beberapa titik di sekitar wilayah perbatasan dan tidak seluruhnya berada dalam area pengawasan langsung dari pos utama PLBN. Kegiatan patroli dilakukan oleh personel Satgas Pamantas untuk memantau aktivitas yang terjadi di jalur-jalur tersebut.

Pemanfaatan Teknologi Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan di PLBN Wini memanfaatkan beberapa teknologi pemantauan, seperti kamera pengawas dan perangkat pemantauan wilayah. Peralatan tersebut digunakan untuk memantau aktivitas di kawasan perbatasan serta mendukung proses pemeriksaan terhadap barang dan kendaraan yang melintas. Selain itu, terdapat penggunaan perangkat pengawasan tambahan yang digunakan dalam kegiatan patroli wilayah perbatasan. Perangkat tersebut digunakan untuk memantau area yang berada di luar jangkauan pengawasan langsung dari pos pemeriksaan utama.

Discussion

Analisis Peningkatan Kapabilitas Satgas Pamantas melalui Integrasi Teknologi Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas Satgas Pamantas TNI AD di PLBN Wini dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan yang memanfaatkan teknologi modern. Data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penggunaan perangkat pengawasan seperti kamera pemantau, sensor pengawasan wilayah, serta dukungan perangkat pemantauan lainnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi terhadap aktivitas mencurigakan di wilayah perbatasan. Integrasi teknologi tersebut memungkinkan pemantauan wilayah dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan dengan metode patroli konvensional. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa teknologi pengawasan memberikan dukungan penting dalam mengidentifikasi aktivitas yang terjadi di jalur tidak resmi di sekitar wilayah perbatasan. Dengan adanya sistem pemantauan tersebut, petugas dapat melakukan pengawasan terhadap wilayah yang memiliki keterbatasan akses secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berperan sebagai alat pendukung dalam meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perbatasan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep manajemen teknologi dalam keamanan perbatasan yang menekankan pentingnya pemanfaatan sistem pengawasan modern untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas ilegal. Dalam kajian keamanan perbatasan, teknologi pengawasan sering digunakan untuk mendukung kegiatan intelijen dan pengawasan wilayah yang memiliki keterbatasan akses fisik. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi pengawasan dapat meningkatkan efektivitas sistem pengamanan wilayah perbatasan. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang membahas pengamanan wilayah perbatasan, beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pemantauan seperti sistem sensor dan kamera pengawas mampu meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah yang memiliki kondisi geografis yang kompleks. Temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian tersebut, di mana teknologi pengawasan digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengawasan wilayah perbatasan secara lebih efektif.

Sinergi Antar Lembaga dalam Sistem Pengamanan Perbatasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan di PLBN Wini melibatkan berbagai instansi yang tergabung dalam sistem Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS). Koordinasi antar lembaga dilakukan melalui pertukaran informasi, rapat koordinasi, serta pelaksanaan operasi gabungan di wilayah perbatasan. Kegiatan koordinasi tersebut memungkinkan setiap instansi menjalankan peran sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam proses pengawasan wilayah perbatasan. Data penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sistem koordinasi antar lembaga memudahkan proses pertukaran informasi mengenai aktivitas yang terjadi di wilayah perbatasan. Informasi yang diperoleh dari salah satu instansi dapat digunakan oleh instansi lain dalam proses pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem koordinasi antar lembaga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengamanan wilayah perbatasan.

Dalam perspektif teori manajemen perbatasan, koordinasi antar lembaga merupakan salah satu unsur penting dalam pendekatan Integrated Border Management. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di wilayah perbatasan. Melalui koordinasi yang terintegrasi, proses pengawasan terhadap arus orang dan barang dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengamanan wilayah perbatasan sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem pengawasan. Penelitian mengenai pengamanan perbatasan di berbagai negara menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat proses penanganan terhadap aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan. Temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian tersebut, di mana koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor penting dalam pengamanan wilayah perbatasan.

Peran Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Sistem Deteksi Dini

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan teritorial memiliki peran dalam mendukung pengawasan wilayah perbatasan. Melalui kegiatan pembinaan teritorial, aparat keamanan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan. Kegiatan tersebut meliputi komunikasi sosial, kegiatan pembinaan masyarakat, serta penyampaian informasi mengenai pentingnya menjaga keamanan wilayah perbatasan. Data wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan sering memberikan informasi kepada aparat keamanan mengenai aktivitas yang terjadi di wilayah tersebut. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh aparat keamanan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pengawasan dan patroli di wilayah perbatasan. Dalam kajian keamanan nasional, keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah sering dikaitkan dengan konsep pertahanan berbasis masyarakat atau *community-based security*. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi dalam sistem deteksi dini terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, aparat keamanan dapat memperoleh informasi yang lebih cepat mengenai aktivitas yang terjadi di wilayah perbatasan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perbatasan. Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai kondisi lingkungan di sekitar mereka, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan kepada aparat keamanan. Temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian tersebut, di mana masyarakat berperan sebagai sumber informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan wilayah perbatasan.

Kebaruan Penelitian (Research Novelty)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan analisis strategi peningkatan kapabilitas Satgas Pamantas TNI AD dengan kerangka analisis DOTMLPFI dalam konteks pengamanan wilayah perbatasan. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kapabilitas organisasi dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga memerlukan integrasi antara pemanfaatan teknologi pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung sistem deteksi dini. Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya pendekatan multidimensional dalam pengamanan wilayah perbatasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kapabilitas Satgas Pamantas di PLBN Wini melibatkan kombinasi antara pemanfaatan teknologi pengawasan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengawasan wilayah perbatasan. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengamanan wilayah perbatasan dalam menghadapi ancaman penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan RI-RDTL.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas Satgas Pengamanan Perbatasan TNI AD di PLBN Wini dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan RI-RDTL dilakukan melalui penguatan beberapa aspek utama, yaitu pemanfaatan teknologi pengawasan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam sistem pengamanan perbatasan. Integrasi teknologi pemantauan dengan kegiatan patroli wilayah memberikan dukungan terhadap peningkatan kemampuan deteksi terhadap aktivitas yang terjadi di jalur tidak resmi di wilayah perbatasan. Selain itu, koordinasi antara TNI, Kepolisian, serta instansi yang tergabung dalam sistem Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) menunjukkan adanya mekanisme kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan wilayah perbatasan. Kegiatan pembinaan teritorial yang melibatkan masyarakat juga memberikan kontribusi dalam mendukung penyampaian informasi mengenai aktivitas yang terjadi di wilayah perbatasan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas pengamanan perbatasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan personel dan peralatan, tetapi juga oleh integrasi antara teknologi, koordinasi kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan wilayah perbatasan. Temuan ini memberikan gambaran mengenai pendekatan pengamanan perbatasan yang bersifat multidimensional, di mana penguatan kapasitas organisasi militer berjalan bersamaan dengan kerja sama lintas lembaga serta dukungan masyarakat di wilayah perbatasan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan jumlah informan serta cakupan penelitian yang hanya difokuskan pada satu wilayah perbatasan, yaitu PLBN Wini. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penelitian ini belum sepenuhnya dapat menggambarkan dinamika pengamanan di seluruh wilayah perbatasan darat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas wilayah kajian pada beberapa titik perbatasan lainnya serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pengamanan wilayah perbatasan.

BIBLIOGRAPHY

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Betz, D. (2015). Cyberspace and the state: Toward a strategy for cyber power. *Journal of Strategic Studies*, 38(1–2), 5–31. <https://doi.org/10.1080/01402390.2014.935110>
- Hart, B. H. Liddell. (1967). *Strategy*. New York: Meridian.
- Kusuma, A. (2024). Strategi peningkatan profesionalisme prajurit Satgas Pamtas dalam menghadapi dinamika ancaman global. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 10(2), 115–129.
- Lestari, D. (2021). Pengaruh geopolitik terhadap pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia–Timor Leste. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.14710/jwl.9.1.45-56>
- Lykke, A. F. (1989). Toward an understanding of military strategy. In *Military strategy: Theory and application*. Carlisle Barracks: U.S. Army War College.
- Maruli, R. (2023). Optimalisasi peran Satgas Pamtas melalui pembinaan teritorial dalam menghadapi ancaman non-tradisional. *Jurnal Teritorial*, 6(2), 87–99.
- Paulus, A., Wibowo, A., & Santoso, R. (2021). Border security management and organizational dynamics in Southeast Asia. *International Journal of Security Studies*, 14(3), 201–215. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1886453>
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat
- Prabowo, B., & Santoso, D. (2021). Implementasi teknologi UAV dalam mendukung operasi pengamanan perbatasan darat. *Jurnal Teknologi Pertahanan*, 7(1), 55–67.
- Pratama, Y., Hidayat, A., & Nugroho, S. (2025). Analisis efektivitas pos lintas batas negara dalam penanggulangan kejahatan transnasional. *Jurnal Pertahanan dan Strategi*, 12(2), 133–148.
- Ramadhan, M. (2023). Peran intelijen teritorial dalam pencegahan penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan. *Jurnal Intelijen Keamanan*, 5(1), 21–34.
- Setiawan, A. (2022). Kolaborasi pertahanan dan keamanan di perbatasan darat Indonesia–Timor Leste: Perspektif border security. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2), 189–203. <https://doi.org/10.18196/jhi.v15i2.13456>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). *World drug report 2025: Global overview of drug demand and supply*. Vienna: UNODC.